

KEWARGANEGARAAN

Volume 23 : Nomor 02, Nopember 2014

Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan Pembelajaran Model *Cooperative Learning* Tipe *Jigsaw* Pada Siswa Kelas V SD Negeri No. 105321 Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang

Syahril Siregar

Mengembangkan Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SD

Risma Sitohang

Aktivitas Belajar Mahasiswa PGSD Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Jigsaw* Pada Mata Kuliah Konsep Dasar IPA

Nurhairani

Behavioralism dan Komunikasi Interaktif

Wawan Suharmawan, Ridho Harta dan Is Eka Herawati

Independensi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Mengawasi Sistem Perbankan

Bisdan Sigalingging

Prospect For Citizenship: Sebuah Tinjauan Terhadap Multikultural di Indonesia

Prayetno dan Ramsul Nababan

Local Strongmen Dalam Dinamika Politik Lokal di Kota Medan

Budi Ali Mukmin Sarumpaet dan Liber Siagian

Dinamika dan Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Parameter Identitas Nasional

Pristi Suhendro L

Diterbitkan oleh :
Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial- Universitas Negeri Medan

ISSN 1693 – 7287

JURNAL KEWARGANEGARAAN

Penerbit

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan

Pembina

Rektor Universitas Negeri Medan
Dekan FIS Unimed

Penanggung Jawab

Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dewan Penyunting Pakar

Djanius Djamin, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Abdul Muin Sibuea, Prof. Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Idrus Affandi, Prof. Dr. (Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung)
Ridwan A. Sani, Dr. (Universitas Negeri Medan, Medan)
Warsono, Prof. Dr. (Universitas Negeri Surabaya, Surabaya)

Ketua Penyunting

Drs. Buha Simamora, SH., MH

Pelaksana Penyunting

Drs. Suady Husein, SH., MS

Drs. Liber Siagian, M.Si

Dra. Yusna Melianti, MH

Drs. Halking, M.Si

Sekretaris Penyunting

Parlaungan Gabriel Siahaan, SH., M.Hum

Ramsul Nababan, SH

Alamat Redaksi :

Jurusan PP-Kn FIS UNIMED

Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan K. Pos. 20221

Telp (061) 6625973 – Fak (061) – 6614002

E-mail PPKn@Plasa.com

Jurnal Kewarganegaraan : terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Nopember. Penyunting mengundang para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk mengirim naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang Pendidikan Kewarganegaraan dari kategori Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Naskah yang dikirim agar mengikuti pedoman penulisan “Jurnal Kewarganegaraan”.

Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi penyunting

Pengantar Redaksiiii

Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran

📄 Peningkatan Motivasi Belajar dan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan Pembelajaran Model *Cooperative Learning* Tipe *Jigsaw* Pada Siswa Kelas V SD Negeri No. 105321 Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang
Syahril Siregar.....1

📄 Mengembangkan Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD
Risma Sitohang.....13

📄 Aktivitas Belajar Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Jigsaw* Pada Mata Kuliah Konsep Dasar IPA
Nurhairani.....25

📄 *Behavioralism* dan Komunikasi Interaktif
Wawan Suharmawan, Ridho Harta, dan Is Eka Herawati.....41

Analisis Hukum

📄 Independensi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia Dalam Mengatur dan Mengawasi Sistem Perbankan
Bisdan Sigalingging.....56

Wacana Demokrasi dan Politik

📄 *Prospect For Citizenship: Sebuah Tinjauan Terhadap Multikultural di Indonesia*
Prayetno dan Ramsul Nababan.....81

📄 *Local Strongmen* Dalam Dinamika Politik Lokal di Kota Medan
Budi Ali Mukmin Sarumpaet dan Liber Siagian.....92

📄 Dinamika dan Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Parameter Identitas Nasional
Pristi Suhendro L.....106

Pengantar

Redaksi

Jurnal Kewarganegaraan setiap diterbitkan mengacu kepada tiga kategori, yaitu Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik. Dalam setiap terbit *Jurnal Kewarganegaraan* memuat tema sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dengan diterbitkannya *Jurnal Kewarganegaraan* Volume 23 Nomor 02, Nopember 2014 menandakan bahwa "*Jurnal Kewarganegaraan*" Jurusan PP-Kn Fakultas Ilmu Sosial - Unimed telah terbit sebanyak 23 kali, dan selalu rutin menerbitkan jurnal setiap tahun dua kali yaitu pada bulan Juni dan Nopember.

Pada terbitan kali ini menampilkan tujuh tulisan dan karya ilmiah yang menitikberatkan pada persoalan Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Hukum, Demokrasi dan Politik.

Rubrik "**Tajuk Rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran**" yang membahas tentang Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar IPS Melalui Penerapan Pembelajaran Model *Cooperative Learning* Tipe *Jigsaw* Pada Siswa Kelas V SD Negeri No. 105321 Tumpatan Nibung Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang yang diangkat oleh **Syahril Siregar**, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal pembelajaran *cooperative* tipe *Jigsaw* terhadap hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dengan mempertimbangkan motivasi berprestasi siswa. Berdasarkan variabel, penelitian ini dilaksanakan di SDN 105321 Batang Kuis. Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana Peningkatan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS dengan menggunakan model *Cooperative Learning* tipe *Jigsaw* di kelas V SDN 105321 Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis, Kab. Deli Serdang . (2) Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS dengan menggunakan *Cooperative Learning* tipe *Jigsaw* di kelas V SDN 105321 Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis , Kab. Deli Serdang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Hasil belajar IPS siswa yang mengikuti model pembelajaran *Cooperative Learning* tipe *Jigsaw* lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional, (2) Terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar IPS pada siswa SDN 105321 Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis. (3) hasil belajar IPS siswa yang

mengikuti model pembelajaran *Cooperative* tipe *Jigsaw* lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional, pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi, (4) hasil belajar IPS siswa yang mengikuti model pembelajaran konvensional lebih tinggi daripada siswa yang mengikuti model pembelajaran *cooperative* tipe *Jigsaw*, pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah.

Sedangkan *Risma Sitohang* membahas tentang bagaimana Mengembangkan Bahan Ajar Dalam Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Bahan ajar juga disebut pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya, *Nurhairani* membahas tentang Aktivitas Belajar Mahasiswa PGSD Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Jigsaw* Pada Mata Kuliah Konsep Dasar IPA, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran Konsep Dasar IPA dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe *Jigsaw* dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa dalam belajar. Selanjutnya *Wawan Suharmawan, Ridho Harta dan Is Eka Herawati*, mengangkat issue tentang *Behavioralism* dan Komunikasi Interaktif, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menyampaikann pesan dari subjek yang satu kepada subjek lainnya. Dalam komunikasi berbagai harapan, keinginan dan realitas hidup dapat tersampaikan termasuk juga di dalamnya realitas pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kegiatan yang mengandalkan komunikasi, komunikasi adalah urat nadi atau titik sentral dalam dunia pendidikan. Kemampuan system pendidikan serta berbagai mekanisme kecanggihan yang ada di dalamnya akan sia-sia tanpa di dasari prinsip komunikasi yang baik. *Behavioralism* adalah aliran yang mengedepankan nilai hubungan antar relasi yang ada dalam suatu ritme memecahkan permasalahan termasuk pendidikan. Tulisan singkat ini akan mencoba mewarnai tentang teori *behavioralism* dan komunikasi interaktif dalam pendidikan.

Untuk rubrik "**Analisis Hukum**" dibahas oleh *Bisdan Sigalingging*, yang mengangkat Issue berkaitan dengan Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) Dalam Mengatur dan Mengawasi Sistem Perbankan, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Independensi BI lebih kuat dibandingkan Independensi OJK. Independensi BI diakui secara implisit di dalam konstitusi 23D UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dalam undang-undang yaitu dalam Pasal 4 ayat (2) UUBI. Sedangkan Independensi OJK tidak disebutkan secara implisit di dalam

konstitusi melainkan hanya disebutkan secara implisit di dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Diharapkan pula jika ingin mempertahankan independensi OJK, maka unsur *Ex Officio* dari Kementerian Keuangan tidak perlu dimasukkan karena mengganggu hakikat independensi OJK atau jika tetap memasukkan unsur *Ex Officio* dari Kementerian Keuangan, maka tidak perlu ditentukan status independen kepada OJK.

Sedangkan rubrik "**Wacana Demokrasi dan Politik**" yang di tulis oleh **Prayetno dan Ramsul Nababan**, mengangkat Issu tentang *Prospect For Citizenship: Sebuah Tinjauan Terhadap Multikultural di Indonesia*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa yang memiliki keragaman pola pikir, seni, agama, pengetahuan, bahasa serta tradisi budaya lokal dengan karakteristik yang unik dan berbeda. Keberagaman yang ada dalam masyarakat Indonesia tersebut bisa saja menjadi pisau bermata dua yang sangat tajam yang menyebabkan kehancuran bagi negara ini, atau bisa saja menjadi alat penguat bangsa Indonesia kedepan dalam menghadapi tantangan dengan adanya kesadaran dari masyarakat serta berkembangnya pendidikan multikultural, keberagaman budaya dan pluralisme. Sedangkan, **Budi Ali Mukmin Sarumpaet dan Liber Siagian**, membahas tentang *Local Strongmen Dalam Dinamika Politik Lokal di Kota Medan*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Sistem pemilihan kepala daerah langsung membawa dampak besar terhadap pembangunan demokrasi di ranah lokal. Dalam pembangunan demokrasi di tingkat lokal, keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara aktif menjadi kata kunci untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin lokal yang memang dikehendaki. Namun, dibalik euforia demokrasi yang dilakukan secara langsung ternyata menciptakan ruang masuknya pemilik modal ataupun masuknya *local strongmen* di jajaran elit politik local. *Local strongmen* di Kota Medan memiliki dua macam sisi yang berbeda. Di satu sisi *local strongmen* menyandang gelar sebagai pengusaha yang dapat berubah menjadi *rent seeker*, di sisi lain mereka menyandang gelar elit dari para premanisme. Kehadiran *local strongmen* sangat identik dengan orang-orang berbagai organisasi yang mereka naungi seperti Pemuda Pancasila (PP), Ikatan Pemuda Karya (IPK), Masyarakat Pancasila Indonesia (MPI), KNPI dan sebagainya. Dalam dinamika politik lokal di Kota Medan, kehadiran *local strongmen* yang dibawah naungan berbagai organisasi kepemudaan dapat berfungsi sebagai *vote getter*, *vote broker*, maupun berfungsi sebagai alat untuk mengintimidasi lawan politik.

Diakhir tulisan ini **Pristi Suhendro L**, mengangkat Issu tentang *Dinamika dan Kedudukan Bahasa Indonesia Sebagai Parameter Identitas Nasional*, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa, Derasnya arus

globalisasi di dalam kehidupan kita berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung perkembangan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Seperti tercantum pada ikrar ketiga sumpah pemuda. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bahasa adalah merupakan suatu keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa.

Penyunting senantiasa mengharapkan kepada para akademisi, guru dan peminat kajian kewarganegaraan untuk berpartisipasi mengirimkan naskah, baik dalam bentuk artikel ilmiah maupun hasil penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan dengan kategori Tajuk rencana Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, Analisis Hukum dan Wacana Demokrasi dan politik.

Harapan kami, Jurnal Kewarganegaraan ini dapat menjadi bacaan ilmiah bagi para penulis dan pembaca pada umumnya, untuk menambah wawasan tentang kewarganegaraan. Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para penulis dan tim penyunting yang telah bekerja keras, sehingga Jurnal Kewarganegaraan ini dapat diterbitkan.

Redaksi

THE
Character Building
UNIVERSITY

PROSPECT FOR CITIZENSHIP: SEBUAH TINJAUAN TERHADAP MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Oleh: Prayetno* dan Ramsul Nababan**

Abstract

Indonesia is a country which has various tribes, mindset, art, religion, science and languages, as well as traditions of the local culture with unique and different characteristics. The diversity that exists in the Indonesian society could be a very sharp double-edged blade that causes destruction to this country. On the other hand, it also can be a mean of reinforcing the Indonesian people in facing the challenges of the future with an awareness of the community and the development of multicultural education, cultural diversity and pluralism.

Keyword: Indonesia, multicultural, integration

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling pluralis di dunia. Dengan ribuan pulau yang ada diwilayahnya, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang dihuni maupun yang tidak berpenghuni. Sebuah fakta yang tidak bisa dinafikan bahwa Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, dan Negara dengan latar belakang yang paling beraneka ragam. Jika kita cermati lebih kurang ada sekitar 400 kelompok etnis dan bahasa yang ada dibawah naungannya, selain Indonesia juga merupakan sebuah Negara dengan kebudayaan yang sangat beragam.

Melihat kondisi geografi, demografi dan penyebaran etnis budaya yang ada di Indonesia, maka pemerintah Indonesia telah bertekad untuk dapat memajukan masyarakat serta pendidikan nasional, yang berakar pada kebudayaan nasional (Pasal I ayat 2 Undang-Undang No. 11 tahun 1989), semangat ini tentu saja mengandung makna bahwa penyelenggaraan pendidikan Nasional Indonesia tentu akan selalu berpijak pada bumi dan budaya Indonesia.

* Prayetno, S.I.P., M.Si adalah Dosen Jurusan PP-Kj Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan

** Ramsul Nababan, SH adalah Dosen Jurusan PP-Kj Fakultas Ilmu Sosial - Universitas Negari Medan

Maka berpijak pada permasalahan di atas, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk dapat mengungkap dan memahami bagaimana psikologi masyarakat Indonesia sebagai upaya menjembatani permasalahan silang budaya, pemahaman ini diperlukan karena pada dasarnya kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan perwujudan (pengejawantahan) manusiawi dari individu-individu yang berada dalam masyarakat pendukungnya sehingga permasalahan kebudayaan akan selalu berkembang sejalan dengan perkembangan pola pikir dan kebutuhan manusia yang sudah barang tentu tidak bisa lepas dari aspek psikologis dan kepribadian dari orang-orang dalam masyarakat tersebut. Dalam konsep yang paling dominan kebudayaan dapat dimaknai sebagai fenomena material, sehingga menurut faham ini pemahaman dan pemaknaan kebudayaan lebih banyak dicermati sebagai keseluruhan system gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 1980 :193).

Menurut Teti Sutardi, (2007) dalam memahami konteks di atas, maka perlu memahami dinamika *Multikulturalisme* sebagai suatu pandangan yang berusaha mengakses eksistensi pluralitas agama, budaya, bahasa, etnis, sistem sosial, dan keanekaragaman lainnya. Pandangan ini muncul sebagai perlawanan terhadap perilaku diskriminasi dan bentuk ketidakadilan lainnya, apakah dalam bentuk diskriminasi individual, yakni bersikap tidak adil kepada orang lain hanya karena alasan pribadi, atau diskriminasi institusional, yakni perlakuan tidak adil terhadap seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari golongan tertentu, terutama dari kelompok minoritas di dalam institusi atau organisasi pemerintahan maupun swasta. Walaupun diskriminasi institusional dilakukan oleh sekelompok orang, mengingat dia sebagai mayoritas dalam institusi itu, maka institusi itu yang melakukan praktek diskriminasi.

Kemajemukan masyarakat Indonesia menjadikan preseden serta menimbulkan asumsi dan pandangan bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi gesekan konflik yang tinggi. Beberapa peristiwa dramatis yang muncul

dan belakangan terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa potensi konflik antar kelompok masyarakat baik yang dilatar belakangi perbedaaan budaya, ras, agama bahkan konflik yang disebabkan oleh strata sosial.

Sebagai contoh, Konflik Ambon, Poso, Aceh, walaupun diyakini oleh para tokoh bukan disebabkan oleh faktor agama, tetapi ketika yang menjadi tumpuan untuk menyelesaikan konflik ini adalah tokoh-tokoh agama, maka menjadi jelas bahwa agama memiliki peran yang sangat signifikan bagi terjadinya konflik secara berkepanjangan. Faktor perbedaan agama yang di dalamnya menyangkut bagaimana nilai-nilai agama yang diyakini oleh seseorang dalam memandang orang lain yang berbeda agama mempengaruhi sikap dan perilakunya terhadap orang itu. Hal tersebutlah yang terkadang sering menjadi dasar bagi seseorang untuk menyakiti orang lain karena perbedaan yang diyakininya.

Menurut Bikhu Parekh (2002) Perjalanan dan perkembangannya bangsa Indonesia yang memiliki keanekaragaman agama, budaya, suku, dan bahasa, tidak lagi membutuhkan konsep pendidikan monokultural eksklusif dan diskriminatif. Sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, Indonesia sangat membutuhkan perdamaian, keadilan, persamaan, dan seterusnya yang merupakan unsur yang dapat dilahirkan oleh pendidikan multikultural. Akan tetapi, patut dicatat bahwa akhir-akhir ini yang terjadi justru jauh dari harapan kemanusiaan yang mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, keharmonisan, keamanan, perdamaian, dan persaudaraan. Dengan kata lain, diskriminasi, konflik sosial agama, krisis politik, ekonomi, budaya dan pendidikan, semakin menggurita di negeri ini. Salah satu persoalan penting yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana solusi agar problem-problem tersebut dapat diminimalisir (Bikhu Parekh 2002: 224-225).

PEMBAHASAN

1. Multi Kultural, Pluralisme Sebagai Titik Lemah Negara

Jika kita melihat sedikit kebelakang, terutama dalam satu dasawarsa terakhir, beberapa tragedi kemanusiaan yang memilukan sekaligus mengkhawatirkan berlangsung silih berganti di Indonesia. Beberapa peristiwa kerusuhan sosial (*riots*) yang terjadi di Indonesia telah membuka mata semua orang tentang apa yang sedang terjadi di negara yang dulunya dikenal damai dan keramahan dan ketentramannya itu. Konflik sosial yang sejatinya merupakan bagian dari *a dynamic chance* dan karenanya bersifat positif - demikian menurut Lewis Coser- telah berubah menjadi amuk massa yang *nggegirisi* yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Tidak hanya eskalasi konflik yang kian bertambah, sifat konflik pun berkembang tidak hanya horizontal tetapi juga vertikal. (Bambang Widianto, 2009)

Kita mungkin akan mengalami kesusahan dan kerumitan mengurai penyebab konflik yang mendadak merebak di hampir semua tempat di tanah air berbuntut pada ketidakmampuan menemukan formula tepat bagi sebuah resolusi konflik yang manjur. Sesuai dengan bentuk, jenis dan eskalasi konflik yang memang beragam, beragam pula faktor penyebabnya. Penyebab konflik dapat berupa faktor politik, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, sentimen etnis dan agama. Hanya saja, faktor ekonomi dan politik sering ditunjuk berperan paling dominan dibanding dua faktor yang disebut terakhir.

Menurut Widianto (2009) kendati sering terlihat di lapangan bahwa konflik yang ada kerap menggunakan simbol-simbol agama misalnya pembakaran dan perusakan tempat-tempat ibadah, penyerangan dan pembunuhan terhadap penganut agama tertentu, namun pertentangan agama dan etnis ternyata hanyalah faktor pengiring dari penyebab konflik yang lebih kompleks dengan latar belakang sosial, ekonomi dan politik yang pekat. (Bambang Widianto, 2009)

Meskipun demikian, tidak ada salahnya (bahkan teramat penting untuk diabaikan) bagi umat beragama untuk mengkaji dan menemukan cara yang

efektif bagi penghayatan, pengamalan sekaligus penyebaran ajaran agama di tengah masyarakat Indonesia yang plural ini. Ada beberapa alasan mengapa aktifitas demikian terasa penting untuk dilakukan. Hal ini disebabkan sempitnya pemahaman para pemeluknya secara potensial memang berpeluang menyulut konflik. Maka wajar jika banyak ilmuwan sekuler yang mengatakan bahwa agama adalah biang kerusuhan. Tampaknya sinyalemen seperti ini terkesan berlebihan dan cenderung menghakimi. Tetapi satu hal yang pasti, sebagaimana sering kita dengar dalam tesis lama dalam ilmu-ilmu sosial, bahwa agama selain menjadi faktor pemersatu sosial, juga berpeluang menjadi unsur konflik. Dua unsur yang tak terpisahkan yang oleh Schimmel diibaratkan seperti sisi mata uang yang sama dalam proses kohesi dan konsensus. (Bambang Widianto, 2009)

Konflik itu sesungguhnya merupakan keniscayaan dan fakta yang selalu terjadi. Keberadaannya senantiasa mengiringi masyarakat plural. Hampir tidak mungkin sebuah masyarakat yang plural tak terlibat dan mengalami konflik. Konflik di sini memang tidak identik dengan kerusuhan dan pertikaian. Konflik bisa saja tidak muncul kepermukaan karena diredam sebagaimana selama ini efektif dimainkan oleh rezim pemerintah Orde Baru, tetapi keberadaannya tak akan hilang sama sekali.

Bahkan menurut Waluya (2007) jika keadaan memungkinkan konflik terselubung (*hidden conflict*) itu akan meledak seperti saat ini. Dengan kata lain, akibat tersumbatnya konflik secara tidak proporsional maka akan lahir konflik yang destruktif dan berpotensi disintegratif bagi kelangsungan sebuah bangsa. (Bagja Waluya, 2007)

Permasalahan suku juga agama menjadi perhatian serius bagi negara yang terbangun lewat gejala masyarakat majemuk. Faktor etnis dan agama menjadi persoalan sensitif yang mampu memicu kekerasan dan konflik, seperti kerap terjadi di Indonesia. Ini akibat proses integrasi nasional yang belum selesai. Integrasi semu sempat terjadi di Indonesia selama Orde Baru, di mana Soeharto berupaya mensubordinasi tiap-tiap budaya etnis ke bawah jargon

budaya nasional. Ia mengembangkan tabu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) sebagai terlarang untuk dipertentangkan di muka publik. Kemayaan ini tampak jelas setelah Soeharto turun dari kekuasaan, konflik-konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antargolongan jadi meruyak. (Bagja Waluya, 2007)

Jika dicermati memang selama selama perjalanan bangsa ini terutama pemerintahan Soeharto kondisi terkesan harmonis meskipun sekadar berupa api dalam sekam. Kondisi harmonis karena negara sangat strong dengan alat pengaman negara (militer, intelijen) yang padu. Terbukti, saat politik kekuasaan Soeharto melemah, banyak konflik yang dilatari etnis, agama, ras, dan antargolongan justru terjadi dengan mudahnya, bahkan berlarut-larut. Malah setelah terpojok Soeharto justru menggunakan tabu SARA-nya sendiri untuk membangun kuda-kuda politik barunya di era 1990-an: Merangkul kalangan Islam modernis dan merenggangkan jarak dengan kelompok nasionalis dan non Muslim yang selama ini menjadi sekutu dekatnya. (Bagja Waluya, 2007)

Berdasarkan data yang terekspose melalui media massa, kerusuhan-kerusuhan itu antara lain terjadi di Purwakarta (awal November 1995); Pekalongan (akhir November 1995); Tasikmalaya (September 1996); Situbondo (Oktober 1996); Rengasdengklok (Januari 1997); Temanggung dan Jepara (April 1997); Pontianak (April 1997); Banjarmasin (Mei 1997); Ende di Flores dan Subang (Agustus 1997) dan Mataram (Januari 2000). (Jajat Burhanuddin dan Arif Subhan, eds., *Sistem Siaga Dini terhadap Kerusuhan Sosial* Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan PPIM, 2000).

2. Menyikapi Multi Kultural dan Pluralisme

Seandainya jika pluralisme itu merupakan sesuatu anugrah atau takdir dari tuhan, sementara konflik adalah sesuatu yang *inhern* di dalamnya. Pertanyaan selanjutnya bagaimana mengelola pluralitas, multi kultural, culture diversity dan konflik yang ada sehingga menjadi sebuah energi sosial bagi penciptaan tatanan bangsa yang lebih baik. Jawabannya tentu panjang dengan melibatkan pengkajian seluruh faktor yang ada. Akan tetapi terkait dengan

kajian ini (memahami *pluralitas multi kultural, culture diversity*), ternyata menjaga kerukunan tidak cukup hanya memahami keanekaragaman yang ada di sekitar kita secara apatis dan pasif.

Menurut Waluya (2007) dalam memahami pluralisme meski melibatkan sikap diri secara pluralis pula. Sebuah sikap penuh empati, jujur dan adil menempatkan kepelbagaian, perbedaan pada tempatnya, yaitu dengan menghormati, memahami dan mengakui eksistensi orang lain, sebagaimana menghormati dan mengakui eksistensi diri sendiri. (Bagja Waluya, 2007)

Menurut Freire (2000) kenyataan kehidupan multikultural di negeri ini hingga kini ibarat api dalam sekam yang suatu saat bisa muncul akibat suhu politik, agama, sosio budaya yang memanas yang memungkinkan konflik tersebut muncul kembali. Maka menjadi keharusan bagi kita bersama untuk memikirkan upaya pemecahan (*solution*). Termasuk pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah kalangan pendidikan. Minimal, pendidikan harus mampu memberikan penyadaran (*consciousness*) kepada masyarakat bahwa konflik bukan suatu hal yang baik untuk dibudayakan, proses penyadaran pihak-pihak yang berkonflik merupakan proses yang sangat mendasar, karena bagaimana mungkin suatu konflik ditransformasikan secara sadar kecuali jika pihak-pihak dalam suatu konflik adalah subjek yang sadar. (Paulo Freire, 2000: 166)

Oleh karena itu menurut Nasution (1994) transformasi pendidikan selayaknya juga mampu memberikan tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya masyarakat Indonesia yang multikultural. Pendekatan multidimensional yang merupakan agenda pendidikan multikultural dapat merupakan jalan alternatif untuk megurangi lahirnya *prejudice* atau prasangka buruk yang memicu *social conflict* dalam era pluralitas budaya dan agama (S. Nasution, 1994: 49-50)

Pada bagian lain menurut Bambang Widodo Umar (2010) terdapat beberapa cara dalam menangani konflik di dalam masyarakat (*conflict management style*), yaitu:

- a. Kompromi (*compromis*)–berunding (*negotiating*), yaitu cara penyelesaian konflik di mana masing-masing pihak tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah (*neither win-win nor lose-lose approach*). Pihak yang terlibat saling memberikan kelonggaran atau konsesi. Kedua pihak mendapatkan apa yang diinginkan tetapi tidak penuh, dan kehilangan tetapi tidak seluruhnya.
- b. Penyesuaian (*accomodating*), perlunakan (*smoothing*), penurunan (*obliging*). Cara ini merupakan pendekatan kalah-menang (*losewin approach*). Konflik diredam dengan cara mengakomodir berbagai macam kepentingan orang-orang yang berkonflik, salah satu pihak yang terlibat melepaskan dan mengesampingkan hal yang diinginkan sehingga pihak yang lain mendapatkan sepenuhnya hal yang diinginkan.
- c. Kerjasama (*collaborating*) atau menghadapi (*confronting*). Kedua pihak bekerjasama dan mencari jalan pemecahan yang memuaskan bagi keduanya. Cara ini merupakan pendekatan menang-menang (*win-win approach*). Dalam penyelesaian ini pihak yang berkonflik diajak ke meja perundingan untuk menyelesaikan sendiri apa yang diinginkan.
- d. *Avoidance* (menghindari). Konflik dikendalikan dengan cara membatasi waktu atau membagi wilayah agar masing-masing kelompok tidak saling benturan satu sama lain dan agar bentrokan tidak semakin meluas (*win-lose approach*).
- e. Bersaing (*competing*), menguasai (*dominating*) atau memaksa (*forcing*). Cara ini merupakan pendekatan terhadap konflik yang berciri menang-kalah (*win-lose approach*).

Masih menurut Umar (2010) cara ini dilakukan dengan mengorbankan pribadi dan kepentingan pihak lain tetapi ada aturan permainannya, yakni dalam sistem kompetisi. Lebih lanjut dikatakan bahwa terdapat beberapa model dalam penyelesaian konflik, yaitu :

- a) *Mediation*, cara ini menggunakan pihak ketiga sebagai penengah. Mediator yang ditunjuk adalah mereka yang telah disepakati bersama dan mampu bertindak dalam penyelesaian secara obyektif. Dari usahanya belum tentu hasilnya dipakai untuk merumuskan perdamaian;
- b) *Arbitration*, cara ini berasal dari penyelesaian konflik dagang (menyelesaikan masalah di luar lembaga formal). Penyelesaian konflik cara ini tidak menekankan prosesnya tetapi menekankan hasilnya;
- c) *Family Conference*, merupakan cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dianggap tidak serius dan yang melibatkan dua keluarga atau lebih dalam suatu konflik. Partisipasi pihak-pihak yang bertikai bersifat sukarela;
- d) *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, cara ini dikenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat. Merupakan alternatif penyelesaian konflik dengan menggunakan pihak ketiga yang berperan di sekitar mereka. Bisa dari tokoh masyarakat juga dari aparat. Cara ini tidak menjamin penyelesaian konflik secara tuntas;
- e) *Ombudsman*, dimana menurut sejarahnya lembaga ini merupakan lembaga yang profesional & independen. Anggotanya terdiri dari orang-orang yang punya reputasi baik, profesi yang khas dan bersifat netral. Penyelesaian konflik dengan cara ini berarti semua pihak menyerahkan sepenuhnya permasalahan untuk diselesaikan secara independen tanpa ada tekanan dari pihak pelapor atau terlapor;
- f) *Rekonsiliasi*, ini adalah cara penyelesaian konflik di mana pihak yang bersalah terlebih dulu menyampaikan permohonan maaf (*to*

pardon) dan pihak lain memberikan maaf (*forgive*) dengan syarat bahwa mereka tidak melupakan masalah itu (*not forget*) di kemudian hari;

- g) *Negosiasi* yakni tawar menawar dari berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga tercapai *win win solution* atau *lose lose solution* yang memuaskan kedua belah pihak. Kalaupun terjadi *win lose solution*, haruslah bersifat *pareto optimum result* (diharapkan kekalahan tersebut bersifat relatif).

KESIMPULAN

Segala macam permasalahan bangsa Indonesia mengenai keberagaman etnik, agama, ras, dan budaya telah memunculkan disintegrasi nasional yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Masalah-masalah yang diungkapkan secara lugas ini bukan untuk mendiskreditkan kelompok sosial tertentu, atau bahkan menjadikan kita bangsa Indonesia menjadi frustrasi dan semakin membenci satu sama lain termasuk membenci pemerintah, hal tersebut akan semakin menambah persoalan sosial yang akan semakin rumit. Untuk itu diperlukan beberapa faktor agar Indonesia mampu mengatasi masalah Pluralitas, multi kultural dan *culture diversity* antara lain (bagya waluya, 2007) :

1. Sebagai sebuah negara yang mengklaim diri sebagai satu-satunya negara kepulauan terbesar dengan berbagai kemajemukan budayanya, Indonesia harus mampu memenuhi nilai-nilai dasar dari paham demokrasi itu sendiri.
2. Kesadaran secara umum, dalam hal ini kesadaran nasional akan realitas sosial yang harus diakomodir dan diunifikasi dalam sebuah wadah politik yang mampu mencakup semua kepentingan kelompok sosial di Indonesia.
3. Nilai-nilai kearifan lokal bangsa yang sebagian besar menyangkut nilai kolektif semakin ditingkatkan bukan berganti menjadi sekularisme sebagai akibat dari globalisasi dan tuntutan hidup yang semakin tinggi, sehingga kondisi pluralisme di Indonesia tidak berada di ujung tanduk,

dalam artian memiliki tempat di tengah masyarakat untuk dijunjung sebagai suatu kebanggaan. Hal ini dikarenakan oleh pemahaman substansi demokrasi baik oleh elit politik, maupun masyarakat luas.

4. Kesadaran moral dan etika politik harus dimiliki oleh bangsa Indonesia, sehingga ketika diberi kebebasan pada masa reformasi masyarakat Indonesia tidak mengalami kebingungan dan tidak membentuk dan menjadikan kelompok sosial sebagai tempat mengapresiasi keinginannya berdasarkan kesamaan ideologi, agama, budaya, dan etnis.
5. Peningkatan pendidikan Multikultural di institusi pendidikan Indonesia baik pihak swasta maupun negeri, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dikalangan masyarakat terutama di kalangan para akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat, *Sistem Siaga Dini terhadap Kerusuhan Sosial* (Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan PPIM, 2000).
- Jajat Burhanuddin dan Arif Subhan, eds., *Sistem Siaga Dini terhadap Kerusuhan Sosial* Jakarta: Balitbang Agama Depag RI dan PPIM, 2000.
- Paul Gorski. *Six Critical Paradigm Shift For Multicultural Education and The Question We Should Be Asking*, dalam [www. Edchange.org/ multicultural](http://www.Edchange.org/multicultural) diakses tanggal 8 Mei 2014.
- Freire, Paulo. (2000). *Pendidikan Pembebasan*. Jakarta, LP3S.
- Bikhu Parekh. 2002. *Pendidikan Demokrasi Pada Masyarakat Multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- Nasution S. 1994. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bambang Widodo Umar. 2010. *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tedi Sutardi, *Antropologi Mengungkap Keragaman Budaya*, Setia Purna Inves, Bandung, 2007. <http://mulla71.multiply.com>
- Bagja Waluya. 2007 *Sosiologi Fenomena Sosial di Masyarakat*, Setia Purna Inves, Bandung.
- Bambang Widianto dan Iwan Meulia Pirous, *Perspektif Budaya Kumpulan Tulisan Koentjaraningrat Memorial Lectures IV/2004-2008*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.